

## ANALISIS PERAN LAHAN GAMBUT DALAM PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

Taryono

Dosen Tetap, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Riau

E-mail : taryono@lecturer.unri.ac.id

**Abstract:** *The largest part of Riau Province is peat land which reaches an area of 4,971,226.71 Ha or 55.24%. Thus, it is undeniable that the peat ecosystem is an inseparable part of the lives of the Riau people in improving their welfare. This study aims to analyze the ability of peatland economic resources, the creation of job opportunities, and the status of village progress in the peat hydrological unit. The analytical method used is quantitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the GRDP of ADHB on peatlands in Riau Province is estimated at Rp. 368,214.96 billion and became Rp. 380,730.41 billion in 2020. The economic resources of peatlands in Riau Province are able to provide job opportunities in 2020 as many as 2,870,557 people. The agriculture, forestry and fishery sectors, followed by the trade and industrial sectors. Labor productivity based on ADHB's GDP in 2020 reached Rp. 132.63 million per worker while real productivity as reflected in ADHB's GRDP reaches Rp. 89.31 million per worker. In general, the progress status of villages in the peat hydrological unit with developing status is around 57.28%, developed is around 19.97% and independent is around 4.85%. Thus, there are still around 17.20% of villages with underdeveloped status and 0.69% with very underdeveloped status.*

**Keywords:** *Peatlands, Economy*

### I. PENDAHULUAN

Wilayah Provinsi Riau yang berada di sekitar Selat Malaka menjadikan tipologi lahannya sebagian besar berada pada daratan rendah. Kesatuan hidrologi yang mengalir dari hulu sungai melintasi cekungan, rawa dan daerah pesisir melahirkan ekosistem gambut. Tidak dapat dipungkiri kehidupan penduduk Provinsi Riau sebagian besar terkait dengan ekosistem gambut. Sebagai sumberdaya ekonomi, lahan gambut menjadi sumber penghidupan penduduk dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sumberdaya lahan merupakan salah satu faktor produksi yang penting sebagai input dalam menghasilkan barang dan jasa. Luas wilayah Provinsi Riau mencapai seluas 8.999.896,34 Ha, dimana sebagian besar sumberdaya lahan berupa lahan gambut dengan luas mencapai 4.971.226,71 Ha atau 55,24% dan selebihnya seluas 4.028.669,63 Ha atau 44,76% merupakan lahan bukan gambut. Wilayah kabupaten/kota dengan sumberdaya lahan gambut terluas adalah Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas lahan gambut mencapai

1.169.153,62 Ha dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan seluas 784.036,69 Ha. Sedangkan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah yang tidak terdapat kesatuan hidrologi gambut.

Terjadinya kebakaran lahan, kesalahan dalam pengelolaan air, dan kegiatan masyarakat lainnya menyebabkan lahan gambut terdegradasi. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya fungsi hidrologi, produksi, dan ekologi akibat memburuknya sifat kimia, fisika dan biologi gambut, sehingga produktivitasnya menurun, bahkan sebagian menjadi tidak produktif (Masganti, dkk., 2014). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021), di Provinsi Riau setiap tahunnya hampir terjadi kebakaran lahan, dimana selama tahun 2016-2019 luas lahan terbakar tertinggi terjadi ditahun 2019 seluas 90.550,00 Ha dan tahun sebelumnya tertinggi terjadi ditahun 2016 seluas 85.219,51 Ha.

Tabel 1: Luas Lahan Gambut dan Luas Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Luas Gambut (Ha)	Luas Bukan Gambut (Ha)	Luas Wilayah ADM (Ha)	% Luas Gambut
KUANTAN SINGINGI	0,00	536.732,00	536.732,00	0,00
PEKANBARU	8.210,25	55.690,90	63.901,15	12,85
ROKAN HULU	133.049,62	633.793,00	766.842,62	17,35
DUMAI	206.238,30	534,58	206.772,88	99,74
KAMPAR	212.287,39	836.397,00	1.048.684,39	20,24
INDRAGIRI HULU	267.076,53	531.830,00	798.906,53	33,43
KEPULAUAN MERANTI	361.725,04	1.954,15	363.679,19	99,46
SIAK	553.336,41	224.606,00	777.942,41	71,13
ROKAN HILIR	616.395,59	284.731,00	901.126,59	68,40
BENGKALIS	659.717,28	204.749,00	864.466,28	76,31
PELALAWAN	784.036,69	541.035,00	1.325.071,69	59,17
INDRAGIRI HILIR	1.169.153,62	176.617,00	1.345.770,62	86,88
Total	4.971.226,71	4.028.669,63	8.999.896,34	55,24

Sumber : Hasil overlay Peta KHG dan Peta Administrasi Provinsi Riau, 2021

Karakteristik lahan gambut dengan tekstur lunak, sifat asam yang tinggi, unsur hara yang terbatas, dan pada umumnya berupa lahan basah menjadikan tantangan pembangunan pada lahan gambut jauh lebih berat daripada lahan bukan gambut. Akibatnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pada lahan gambut membutuhkan biaya yang relatif lebih besar. Besarnya biaya investasi yang dibutuhkan pada lahan gambut tentunya akan memperkecil margin keuntungan yang diharapkan. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu wilayah. Selanjutnya, tingkat kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut akan berkorelasi positif terhadap penyerapan kesempatan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.

## II. KERANGKA TEORI

Di negara sedang berkembang ketersediaan sumberdaya alam sangat melimpah, namun pengelolaannya yang belum sustainable, maka kemanfaatannya terhadap pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat belum optimal (Mukhlis I, 2009). Sumberdaya alam harus dikelola

secara bijaksana sehingga tidak menimbulkan berbagai masalah yang menjadi kutukan tidak stabilnya kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (Pakniy, Y., dkk., 2017). Sumberdaya lahan gambut diyakini dapat memotivasi untuk merubah ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan sosial ekonomi keluarga (Zulkarnaini, Z., dan Lubis, E. E., 2018). Penelitian Wardie dan Shinta, (2016) menunjukkan bahwa usaha tani yang berkelanjutan pada lahan gambut telah meningkatkan keadaan ekonomi rumah tangga tani dalam kategori baik. Namun demikian, Rachmawati dan Tarigan (2020) mengingatkan bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan pertanian dapat menimbulkan kontroversi apabila tidak dikembangkan secara tepat.

Penelitian Idris, dkk., (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Pada lahan gambut pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dilakukan melalui kegiatan *Rewetting*, *Revegetation*, and *Revitalization* guna mengendalikan kerusakan gambut (Adji, dkk., 2020). Usaha tersebut menurut Setiadi (2014) dapat menekan dampak negatif terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Penciptaan lapangan kerja yang menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada lahan gambut, menurut Suwondo, dkk., (2018) bahwa kebijakan yang berbasis industri kehutanan harus diterapkan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya efek lanjutan pada sektor lainnya. Sebaliknya, kebijakan harus dapat menerapkan pembangunan berkelanjutan menuju keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekosistem rawa gambut.

Pemanfaatan sumberdaya lahan gambut akan terkait dengan pembangunan desa, mengingat sebagian besar masyarakat pada wilayah gambut bergantung hidupnya pada sector pertanian yang identik dengan pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, Ramdhan, dan Siregar (2018) menyarankan bahwa pengelolaan wilayah gambut dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan faktor sosial, ekonomi dan juga lingkungan fisik. Jika tidak, maka menurut Nugraha (2019) pemanfaatan sumberdaya lahan gambut hanya akan menimbulkan kerugian bagi pembangunan desa.

### III. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Nasional, di Provinsi Riau semua Kabupaten Kota terdapat KHG kecuali Kabupaten Kuantan Singingi.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh Lembaga/instansi yang berwenang. Analisis data kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau meliputi analisis kemampuan ekonomi lahan gambut dalam menghasilkan barang dan jasa, dan produktivitas tenaga kerja.

Peran kemampuan ekonomi lahan gambut dalam menghasilkan barang dan jasa dilakukan dengan formulasi sebagai berikut :

$$PDRB_{LG_i} = PDRB_i \times RLG_i$$

Keterangan :

$PDRB_{LG_i}$  = PDRB lahan gambut wilayah kabupaten/kota i

$PDRB_i$  = PDRB wilayah kabupaten/kota i

$RLG_i$  = ratio luas lahan gambut wilayah i / luas administrasi wilayah i

Produktivitas tenaga kerja pada lahan gambut dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$PTK_i = \frac{PDRB_{LG_i}}{JTK_i}$$

Keterangan :

$PTK_i$  = Produktivitas Tenaga Kerja wilayah i

$JTK_i$  = Jumlah Tenaga Kerja wilayah i

### IV. ANALISA DATA

Hasil pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat diwilayah Provinsi Riau dapat tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB tersebut dihasilkan atas penggunaan factor produksi, baik berupa tanah, modal maupun tenaga kerja. Kemampuan factor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa di Provinsi Riau pada beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan, namun adanya pandemic covid-19 menyebabkan ekonomi Provinsi Riau mengalami kontraksi. Pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan dari seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau sebesar Rp. 682.080,03 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 732.351,96 milyar ditahun 2020 namun angka ini masih lebih rendah dari tahun sebelumnya ditahun 2019 sebesar Rp. 766.758,34 milyar. Ditahun 2020, wilayah di Provinsi Riau dengan kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku

terbesar adalah Kabupaten Bengkalis (15,82%), Kota Pekanbaru (15,77%) dan Kabupaten Siak (10,63%). Sedangkan wilayah kabupaten/kota dengan kontribusi

PDRB atas dasar harga berlaku terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 2,42%.

Tabel 2 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
Bengkalis	132.200,50	132.978,17	148.603,30	141.555,85	115.882,67
Dumai	27.962,26	30.342,84	33.076,21	36.145,36	36.322,88
Indragiri Hilir	57.291,70	60.870,71	60.180,01	62.702,00	65.022,92
Indragiri Hulu	37.033,15	38.726,75	40.386,22	41.659,13	42.626,31
Kampar	69.676,25	71.571,02	77.152,93	77.278,81	72.977,19
Kepulauan Meranti	15.744,69	16.417,91	17.847,05	18.067,42	17.732,53
Pekanbaru	92.129,33	101.113,42	108.848,58	119.111,82	115.519,46
Pelalawan	41.164,87	43.840,64	46.073,49	47.724,11	50.639,75
Rokan Hilir	73.268,03	73.997,26	78.620,93	74.588,18	67.951,32
Rokan Hulu	29.145,61	30.992,30	32.290,19	33.882,24	36.083,71
Siak	78.941,93	79.593,52	84.262,91	82.172,93	77.844,13
Kuantan Singingi	27.521,70	29.504,32	30.463,63	31.870,50	33.749,09
Total	682.080,03	709.948,87	757.805,45	766.758,34	732.351,96

Sumber : BPS Riau, 2021

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, maka pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, jika terjadi peningkatan pertumbuhan output riil barang dan jasa yang lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Output riil barang dan jasa yang tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Riau meningkat dari sebesar Rp. 458.592,63 milyar di tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 490.072,70 milyar

ditahun 2020. Namun capaian ditahun 2020 tersebut masih lebih rendah dari tahun sebelumnya ditahun 2019 yang telah mencapai sebesar Rp. 495.447,70 milyar.

Dengan mempertimbangkan luasan lahan gambut dan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah sebagaimana tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto, maka dapat diestimasi kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut suatu wilayah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar Rp. 368.214,96 milyar dan menjadi sebesar Rp. 380.730,41 milyar ditahun 2020. Wilayah dengan kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut terbesar pada umumnya adalah daerah penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak.

Tabel 3: PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
Bengkalis	80.577,99	79.189,78	77.848,26	76.376,99	73.856,11
Dumai	21.391,57	22.344,83	23.538,47	24.855,82	24.595,61
Indragiri Hilir	39.697,57	41.491,37	42.988,74	44.775,56	44.927,61
Indragiri Hulu	26.742,94	27.807,32	28.778,02	29.866,45	29.830,89
Kampar	47.610,21	49.022,01	49.958,84	51.888,86	51.423,90
Kepulauan Meranti	11.451,08	11.827,31	12.304,37	12.629,43	12.683,87
Pekanbaru	60.891,07	64.619,26	68.108,76	72.200,41	69.016,92
Pelalawan	30.654,22	31.899,18	33.056,06	34.336,47	35.107,15
Rokan Hilir	45.556,00	46.265,17	46.136,68	46.436,79	45.992,51
Rokan Hulu	21.792,97	22.965,45	23.925,69	25.101,65	25.479,88
Siak	51.557,22	52.029,65	52.595,33	53.366,53	53.313,85
Kuantan Singingi	20.669,80	21.574,02	22.579,12	23.612,74	23.844,40
Total	458.592,63	471.035,36	481.818,34	495.447,70	490.072,70

Sumber : BPS Riau, 2021

Dengan demikian, penurunan produksi dan harga minyak dunia akan mempengaruhi kondisi ekonomi pada wilayah tersebut. Kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016, diperkirakan sebesar Rp. 100.888,79 milyar dan turun menjadi sebesar Rp. 88.435,84 milyar ditahun 2020. Kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016, diperkirakan sebesar Rp. 50.117,36 milyar dan turun menjadi sebesar Rp. 46.480,59 milyar ditahun 2020. Kemampuan

sumberdaya ekonomi lahan gambut di Kabupaten Siak pada tahun 2016, diperkirakan sebesar Rp. 56.149,97 milyar dan turun menjadi sebesar Rp. 55.369,13 milyar ditahun 2020. Sedangkan wilayah yang bukan penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Indragiri Hilir, kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambutnya diperkirakan meningkat dari sebesar Rp. 49.772,82 milyar ditahun 2016 menjadi sebesar Rp. 56.489,41 milyar ditahun 2020.

Tabel 4: Estimasi PDRB ADHB Pada Lahan Gambut di Provinsi Riau Tahun 2016-2020

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
BENGKALIS	100.888,79	101.482,27	113.406,58	108.028,32	88.435,84
DUMAI	27.889,97	30.264,39	32.990,70	36.051,91	36.228,97
INDRAGIRI HILIR	49.772,82	52.882,13	52.282,07	54.473,08	56.489,41
INDRAGIRI HULU	12.380,28	12.946,45	13.501,22	13.926,76	14.250,09
KAMPAR	14.104,71	14.488,27	15.618,23	15.643,71	14.772,93
KEPULAUAN MERANTI	15.660,09	16.329,70	17.751,16	17.970,34	17.637,25
PEKANBARU	11.837,11	12.991,42	13.985,26	15.303,92	14.842,36
PELALAWAN	24.357,00	25.940,24	27.261,40	28.238,06	29.963,23
ROKAN HILIR	50.117,36	50.616,18	53.778,90	51.020,39	46.480,59
ROKAN HULU	5.056,86	5.377,26	5.602,45	5.878,68	6.260,64
SIAK	56.149,97	56.613,43	59.934,69	58.448,12	55.369,13
Total	368.214,96	379.931,73	406.112,64	404.983,27	380.730,41

Sumber : Diolah dari Data PDRB dan Luas Lahan Gambut, 2021

Kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut antar wilayah di Provinsi Riau pada beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran. Pada wilayah penghasil minyak bumi pada umumnya kontribusi sumberdaya ekonomi cenderung turun dan sebaliknya pada wilayah bukan penghasil minyak bumi cenderung meningkat. Kontribusi sumberdaya ekonomi lahan gambut pada wilayah penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Bengkalis diperkirakan turun dari sebesar 27,40% ditahun 2016 menjadi sebesar 23,23% ditahun 2020. Kabupaten Siak kontribusinya turun dari sebesar 15,25% ditahun 2016 turun menjadi sebesar 14,54% ditahun 2020. Kabupaten Rokan Hilir kontribusinya turun dari sebesar 13,61% ditahun 2016 menjadi sebesar 12,21% ditahun 2020. Sebaliknya, kontribusi sumberdaya ekonomi lahan gambut pada wilayah bukan penghasil minyak bumi cenderung meningkat, misalnya Kabupaten Indragiri Hilir dari sebesar 13,52% ditahun 2016 meningkat menjadi sebesar 14,84% ditahun 2020. Kemudian, Kabupaten Pelalawan meningkat dari sebesar 6,61% ditahun 2016 menjadi sebesar 7,87% ditahun 2020.

Kemampuan riil sumberdaya ekonomi lahan gambut dalam menghasilkan barang

dan jasa pada kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat namun adanya pandemic covid 19 turut menyebabkan terjadinya kontraksi. Lahan gambut di Provinsi Riau diestimasi memiliki kemampuan sumberdaya ekonomi riil ditahun 2016 sebesar Rp. 244.860,53 milyar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 249.566,33 milyar ditahun 2017. Kemampuan lahan gambut dalam menghasilkan sumberdaya ekonomi riil diperkirakan meningkat hingga ditahun 2019 menjadi sebesar Rp. 258.699,06 milyar namun ditahun 2020 dengan adanya pandemic covid 19 kemampuan sumberdaya ekonomi riil pada lahan gambut terkontraksi menjadi sebesar Rp. 256.367,18 milyar. Kontraksi terbesar pada umumnya dialami oleh wilayah penghasil migas seperti Kabupaten Bengkalis dari sebesar Rp. 61.493,08 milyar ditahun 2016 turun menjadi sebesar Rp. 56.363,28 milyar ditahun 2020. Sedangkan kemampuan sumberdaya ekonomi riil pada wilayah bukan penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Indragiri Hilir cenderung meningkat dari sebesar Rp. 34.487,72 milyar ditahun 2016 menjadi sebesar Rp. 39.031,38 milyar ditahun 2020.

Tabel 5: Estimasi PDRB ADHK tahun 2010 Pada Lahan Gambut di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 (Rp. Milyar)

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
BENGKALIS	61.493,08	60.433,67	59.409,88	58.287,09	56.363,28
DUMAI	21.336,27	22.287,06	23.477,62	24.791,56	24.532,02
INDRAGIRI HILIR	34.487,72	36.046,10	37.346,96	38.899,28	39.031,38
INDRAGIRI HULU	8.940,23	9.296,06	9.620,57	9.984,43	9.972,54
KAMPAR	9.637,83	9.923,63	10.113,27	10.503,97	10.409,85
KEPULAUAN MERANTI	11.389,55	11.763,76	12.238,25	12.561,57	12.615,72
PEKANBARU	7.823,50	8.302,52	8.750,86	9.276,57	8.867,54
PELALAWAN	18.137,91	18.874,55	19.559,07	20.316,68	20.772,68
ROKAN HILIR	31.161,57	31.646,66	31.558,77	31.764,05	31.460,15
ROKAN HULU	3.781,15	3.984,58	4.151,18	4.355,22	4.420,84
SIK	36.671,72	37.007,75	37.410,11	37.958,65	37.921,18
Total	244.860,53	249.566,33	253.636,54	258.699,06	256.367,18

Sumber : Diolah dari Data PDRB dan Luas Lahan Gambut, 2021

Pertumbuhan ekonomi dari Provinsi Riau mengalami fluktuatif. sumberdaya ekonomi riil lahan gambut di Diestimasi ditahun 2017 sumberdaya

ekonomi riil lahan gambut mampu tumbuh sebesar 1,92% dan ditahun 2018 tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,63%. Ekonomi pada wilayah lahan gambut yang mulai membaik ditahun 2019 yang tumbuh sebesar 2,00%, kembali terkoreksi ditahun 2020 yang tumbuh negative 0,90%. Pertumbuhan ekonomi pada wilayah lahan gambut yang terkoreksi seperti Kabupaten Bengkalis ditahun 2017 tumbuh negative sebesar 1,72% dan terus terkoreksi hingga ditahun 2020 tumbuh negative sebesar 3,30%. Diestimasi pada tahun 2020 umumnya pertumbuhan sumberdaya ekonomi riil lahan gambut diwilayah Provinsi Riau tumbuh negative kecuali Kabupaten Indragiri Hilir tumbuh 0,34%, Kabupaten Kepulauan Meranti tumbuh 0,43%, Kabupaten Pelalawan tumbuh sebesar 2,24%, dan Kabupaten Rokan Hulu tumbuh sebesar 1,51%.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk di Provinsi Riau menggantungkan hidupnya dari ekosistem gambut. Dari dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau semua wilayahnya terdapat kesatuan hidrologi gambut kecuali kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data BPS, ditahun 2020 jumlah angkatan kerja pada sebelas kabupaten/kota tersebut sebanyak 3.066.018 orang. Kesempatan kerja yang mampu disediakan pada wilayah

kabupaten/kota yang terdapat kesatuan hidrologi gambut di Provinsi Riau ditahun 2020 mencapai sebanyak 2.870.557 orang. Kesempatan kerja yang banyak disediakan adalah jenis pekerjaan pada sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 1.114.149 orang atau 38,81%. Sektor perdagangan mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 507.512 orang atau 17,68% dan sektor industri pengolahan sebanyak 221.252 orang atau 7,71%. Kesempatan kerja sector pertanian terbanyak terdapat pada wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 168.659 orang, Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 164.880 orang, Kabupaten Kampar sebanyak 153.612 orang dan Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 152.454. Kesempatan kerja sector perdagangan terbanyak pada wilayah Kota Pekanbaru sebanyak 149.260 orang, Kabupaten Kampar sebanyak 60.235 orang dan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 54.388 orang. Sedangkan kesempatan kerja sector industry pengolahan terbanyak pada wilayah Kota Pekanbaru sebanyak 48.830 orang, Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 34.019 orang, dan Kabupaten Siak sebanyak 25.038 orang.

Tabel 6 : Penduduk Riau Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota Yang Terdapat Kesatuan Hidrologis Gambut dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020 (Orang)

Kabupaten/Kota	1	2	3	4/5	6	7	8	9	10	11/12/13	14	15	16	17	Jumlah
Indragiri Hulu	89.149	2.346	13.502	1.114	8.814	34.782	8.079	9.537	172	3.879	10.220	12.615	2.876	7.559	204.644
Indragiri Hilir	168.659	707	34.019	719	12.955	54.388	12.646	18.963	1.475	2.826	11.988	13.734	3.766	10.439	347.284
Pelalawan	124.534	283	10.440	984	10.495	28.465	4.555	12.051	621	4.263	8.792	10.546	2.145	4.866	223.040
Siak	87.500	634	25.038	983	5.682	28.702	9.833	14.860	423	3.402	6.604	9.373	1.235	5.410	199.679
Kampar	153.612	3.427	23.006	166	20.835	60.235	11.476	24.337	3.460	10.473	12.874	20.479	5.934	14.384	364.698
Rokan Hulu	164.880	1.397	16.026	-	11.689	39.505	6.560	12.049	1.553	4.224	10.440	18.874	3.097	11.381	301.675
Bengkalis	96.444	6.346	17.458	2.093	16.261	31.494	3.940	13.264	899	5.476	14.987	16.745	3.436	9.962	238.805
Rokan Hilir	152.454	985	10.533	996	7.102	38.755	3.728	12.623	1.092	3.183	8.547	13.710	1.501	6.686	261.895
Kep. Meranti	36.687	344	6.562	118	3.390	12.399	4.568	4.319	946	1.014	5.732	5.881	1.326	3.353	86.639
Pekanbaru	20.599	8.216	48.830	5.870	32.421	149.260	30.342	46.640	9.413	29.361	29.082	31.109	17.997	48.477	507.617
Dumai	19.631	1.166	15.838	1.822	10.290	29.527	8.331	11.371	640	5.880	7.373	11.044	3.581	8.087	134.581
Riau	1.114.149	25.851	221.252	14.865	139.934	507.512	104.058	180.014	20.694	73.981	126.639	164.110	46.894	130.604	2.870.557

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau, Agustus 2020

## Keterangan :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 6. Bangunan 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Jasa Persewaan Bangunan 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya

Berdasarkan data PDRB lahan gambut dan Jumlah penduduk yang bekerja, maka dapat dihitung besarnya produktivitas tenaga kerja dilahan gambut. Rata-rata setiap penduduk yang bekerja pada wilayah Kabupaten/Kota yang terdapat kesatuan hidrologi gambut di Provinsi Riau berdasarkan PDRB ADHB ditahun 2020 dapat menghasilkan nilai barang dan jasa sebesar Rp. 132,63 juta namun secara riil nilai barang dan jasa yang dapat dihasilkan setiap pekerja sebagaimana tercermin menurut PDRB ADHK rata-rata setiap tahun adalah sebesar Rp. 89,31 juta. Dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota

menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pada lahan gambut di Kabupaten Bengkalis dengan produktivitas tertinggi, dimana berdasarkan PDRB ADHB sebesar Rp. 370,33 juta per pekerja yang diikuti oleh Kabupaten Siak sebesar Rp. 277,29 juta per pekerja dan Kota Dumai sebesar Rp. 269,20 juta per pekerja. Namun kemampuan produktivitas riil pekerja dapat terlihat berdasarkan PDRB ADHK, dimana Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 236,02 juta per pekerja, Kabupaten Siak sebesar Rp. 189,91 juta per pekerja, dan Kota Dumai sebesar Rp. 182,28 juta per pekerja.

Tabel 7 : Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Wilayah Kabupaten/Kota yang Terdapat Kesatuan Hidrologi Gambut di Provinsi Riau Tahun 2020 (Rp. Juta/Orang)

KABUPATEN/KOTA	PDRB ADHB	PDRB ADHK
BENGKALIS	370,33	236,02
DUMAI	269,20	182,28
INDRAGIRI HILIR	162,66	112,39
INDRAGIRI HULU	69,63	48,73
KAMPAR	40,51	28,54
KEPULAUAN MERANTI	203,57	145,61
PEKANBARU	29,24	17,47
PELALAWAN	134,34	93,13
ROKAN HILIR	177,48	120,13
ROKAN HULU	20,75	14,65
SIAK	277,29	189,91
Riau	132,63	89,31

Sumber : Diolah dari data PDRB dan Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau, 2020

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil overlay tidak kurang di Provinsi Riau terdapat sebanyak 809 desa/kelurahan yang berada pada Kawasan kesatuan hidrologi

gambut. Pada umumnya desa-desa yang terdapat pada Kawasan kesatuan hidrologi gambut dengan status berkembang sekitar 57,28%. Desa dengan status maju sekitar 19,97% dan desa tertinggal sebanyak 17,20% serta sangat tertinggal sebanyak 0,69%. Sedangkan desa dengan status mandiri telah mencapai sebanyak 4,85%. Persentase status kemajuan desa sangat tertinggal dan tertinggal yang tertinggi

terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai sebesar 47,47% yang diikuti oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencapai sebesar 31,35%. Sedangkan persentase status kemajuan desa mandiri yang tertinggi terdapat di Kabupaten

Bengkalis yang mencapai 22,67% dan diikuti oleh Kabupaten Pelalawan dengan status desa yang mandiri mencapai sebesar 11,48%.

Tabel 8: Persentase Status Kemajuan Desa Pada Kesatuan Hidrologis Gambut Menurut Kabupaten di Provinsi Riau tahun 2020

Kabupaten	Status Kemajuan Desa					
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah
Bengkalis	22,67	37,33	40,00	0,00	0,00	100,00
Indragiri Hilir	0,00	10,13	42,41	46,84	0,63	100,00
Indragiri Hulu	2,63	18,42	68,42	10,53	0,00	100,00
Kampar	5,19	24,68	63,64	6,49	0,00	100,00
Kep. Meranti	0,00	8,96	59,70	28,36	2,99	100,00
Pelalawan	11,48	26,23	62,30	0,00	0,00	100,00
Rokan Hilir	0,00	16,84	65,26	16,84	1,05	100,00
Rokan Hulu	0,00	7,69	69,23	15,38	7,69	100,00
Siak	5,05	28,28	66,67	0,00	0,00	100,00
Riau	4,85	19,97	57,28	17,20	0,69	100,00

Sumber : Diolah dari Data IDM dan Desa Gambut Riau, 2021

Dalam upaya mewujudkan pembangunan pada kesatuan hidrologi gambut yang berkelanjutan, maka pengembangan hidrologi gambut tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa yang seimbang antara dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengembangkan modal sosial dan kearifan local yang ada, akan dapat meningkatkan pembangunan sosial dalam menjaga sumberdaya gambut. Inovasi desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat harus diselaraskan dengan karakteristik dan struktur lahan gambut, sehingga ekosistem lahan gambut dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang Peran Lahan Gambut Dalam Perekonomian Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai :

1. Diestimasi kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar Rp. 368.214,96

milyar dan menjadi sebesar Rp. 380.730,41 milyar ditahun 2020. Wilayah dengan kemampuan sumberdaya ekonomi lahan gambut terbesar pada umumnya adalah daerah penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kabupaten Siak, namun kontribusinya cenderung menurun. Sedangkan wilayah bukan penghasil minyak bumi seperti Kabupaten Indragiri Hilir, diperkirakan mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran kontribusi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terdapat kesatuan hidrologi gambut dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi.

2. Sumberdaya ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau mampu menyediakan kesempatan kerja ditahun 2020 sebanyak 2.870.557 orang. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sector terbanyak dalam penciptaan kesempatan kerja yaitu 1.114.149 orang atau 38,81% diikuti

sektor perdagangan sebanyak 507.512 orang atau 17,68% dan sektor industri pengolahan sebanyak 221.252 orang atau 7,71%. Produktivitas tenaga kerja berdasarkan PDRB ADHB ditahun 2020 mencapai sebesar Rp. 132,63 juta sedangkan produktivitas riil yang tercemin dari PDRB ADHK mencapai sebesar Rp. 89,31 juta.

- Status desa pada Kesatuan Hidrologi Gambut di Provinsi Riau pada umumnya dengan status berkembang sekitar 57,28%, maju sekitar 19,97% dan mandiri sekitar 4,85%. Dengan demikian masih terdapat sekitar 17,20% desa dengan status tertinggal dan sebanyak 0,69% dengan status sangat tertinggal.

### Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah: Menurunnya peran minyak bumi terhadap perekonomian pada wilayah kesatuan hidrologi gambut perlu diikuti dengan reorientasi prioritas pembangunan ke sector unggulan yang memiliki daya ungkit lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah. Sehingga peningkatan kegiatan ekonomi sector unggulan dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menurunkan tingkat pengangguran. Kemudian dalam upaya mewujudkan pembangunan pada kesatuan hidrologi gambut yang berkelanjutan, maka pengembangan hidrologi gambut tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa yang seimbang antara dimensi sosial, ekonomi dan ekologi dengan mengembangkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adji, F. F., Darung, U., dan Silva, K. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Melalui Program Bina Desa Mandiri Peduli Gambut di Kawasan Eks PLG Sejuta Hektar Provinsi Kalimantan Tengah. *Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan*
- Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(2), 26-34.
- Badan Pusat Statistik, 2021. Produk Domestik Regional Bruto (Kabupaten/kota) <https://riau.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--kabupaten-kota-.html#subjekViewTab3>
- Badan Pusat Statistik, 2021. Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Riau, Agustus 2020.
- Idris, K., Syaparuddin, Hodijah, S., 2014. Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol 9(1), April 2014.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021. [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL. 0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Nasional.
- Masganti, Wahyunto, Dariah, A., Yusuf, R. (2014). Karakteristik dan potensi pemanfaatan lahan gambut terdegradasi di Provinsi Riau. *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol. 8 No. 1, Juli 2014; 59-66
- Mukhlis I, 2009. Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal*

- Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 3 Nopember 2009
- Nugraha, R. P. (2019). Analisis Kerugian Ekonomi Pada Lahan Gambut di Kecamatan Pusako, dan Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, 2(2), 1-14.
- Pakniany, Y., Soetarto, E., dan Adiwibowo, S., 2017. Pertambangan Emas Di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan Atau Berkah? (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria). *Jurnal Sosiologi Pedesaan* | Agustus 2017, hal 163-170 | 165
- Rachmawati, R. R., Tarigan, H. (2020). Inovasi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Petani di Lahan Gambut. In *Forum penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 37, No. 1, juli 2020 pp. 77-94).
- Ramdhan, M., & Siregar, Z. A. (2018). Pengelolaan wilayah gambut melalui pemberdayaan masyarakat desa pesisir di kawasan hidrologis gambut Sungai Katingan dan Sungai Mentaya Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Segara*, 14(3), 145-157.
- Setiadi, A., 2014. Socio-Economic Impacts Of Natural Disasters On The Education Sector: A Case Study Of Indonesia. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* Vol. 5, No. 2 Tahun 2014 Hal. 78-86
- Suwondo, S., Darmadi, D., & Yunus, M. (2018). Perlindungan dan pengelolaan ekosistem: analisis politik ekologi pemanfaatan lahan gambut sebagai hutan tanaman industri. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 140-154.
- Wardie, J., & Sintha, T. Y. E. (2016). Analisis sustainabilitas usahatani padi pada lahan gambut di Kabupaten Kapuas. *Agric*, 28(1), 87-94.
- Zulkarnaini, Z., dan Lubis, E. E., 2018. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 61-124